

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pemerintah di Indonesia menyelenggarakan sistem pemerintahan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan bahwa system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia terbagi atas daerah dan provinsi dan selanjutnya dibagi atas kabupaten dan kota dimana tiap provinsi, kabupaten dan kota memiliki pemerintahan daerahnya sendiri yang diatur oleh undang-undang. Penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia selanjutnya dilakukan dengan pemberian wewenang dan kebijakan daerah otonomi.

Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia sendiri diawali dengan dibentuknya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah dan pusat. Seiring berjalannya waktu terjadi perubahan dan ditetapkanlah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang menjelaskan bahwa otonomi daerah merupakan kewenangan daerah otonom dalam mengatur serta mengurus kepentingan urusannya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan keinginan masyarakat.

Diberlakukannya otonomi daerah tersebut memiliki dampak terhadap semakin besarnya wewenang serta tanggung jawab daerah untuk mengelola daerahnya masing-masing. Pemerintah daerah harus mampu untuk mengurus segala urusan rumah tangganya dengan memaksimalkan

pemanfaatan seluruh potensi sumber daya yang ada didaerahnya. Pemerintah harus serius dalam mengelola, serta memaksimalkan segala potensi sumber daya didaerahnya untuk meningkatkan pendapatan asli daerahnya masing masing. Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antar Pusat dan Daerah.

Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah penerimaan yang diperoleh Daerah yang dipungut sesuai dengan Peraturan Daerah dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Bab V Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 menyebutkan bahwa Pendaptan Asli Daerah berasal dari :

1. Pajak Daerah
2. Retribusi Daerah
3. Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan
4. Lain-lain PAD yang sah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) menggambarkan potensi pendapatan keuangan daerah yang biasanya bergantung pada pajak daerah dan retribusi daerah. Upaya peningkatan pendapatan asli daerah harus ditingkatkan oleh pemerintah daerah sendiri. Pemerintah daerah seringkali bergantung pada pemerintah pusat dalam upaya pemberdayaan masyarakat, sedangkan kontribusi yang dihasilkan dari pendapatan daerah masih kecil.

Upaya pemerintah daerah untung meningkatkan pendapatan asli daerahnya yakni dengan memaksimal seluruh potensi sumber daya yang menjadi sumber penerimaan pendapatan daerahnya. Pendapatan daerah

sendiri berkaitan dengan sektor retribusi daerah, sehingga daerah mampu menggali seluruh potensi sumber daya alam yang ada khususnya berupa objek wisata.

Kota Padang memiliki banyak sekali potensi wisata yaitu diantaranya wisata alam, wisata sejarah dan budaya, wisata edukasi, dan lain sebagainya. Dengan cukup banyaknya potensi wisata yang ada dikota padang, memberikan banyak peluang bagi pemerintah kota padang untuk meningkatkan pendapatan asli daerah kota padang melalui sektor pariwisata.

Berdasarkan masalah diatas, maka penulis bermaksud untuk menyusun Tugas Akhir yang berjudul : **“STRATEGI DINAS PARIWISATA DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KOTA PADANG”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Bertolak dari latar belakang diatas, maka penulis menetapkan rumusan masalah, yaitu tentang bagaimana “Strategi Dinas Pariwisata dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Padang”.

## **1.3 Tujuan Penulisan TA**

1. Untuk mengetahui strategi pengembangan sektor yang pariwisata oleh Dinas Pariwisata dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Padang.
2. Untuk mempraktekkan ilmu yang sudah dipelajari selama dibangku perkuliahan ke lapangan sesuai dengan jurusan Keuangan Negara.

3. Persyaratan penyelesaian studi Diploma III Fakultas Ekonomi Universitas Andalas.

#### **1.4 Manfaat Penulisan TA**

1. Bagi Penulis
  - a. Untuk menambah ilmu dan wawasan mengenai Pendapatan Asli Daerah.
  - b. Untuk mengetahui dan mempersiapkan diri untuk masuk ke dunia kerja.
  - c. Untuk meningkatkan kemampuan berpikir dan menganalisis suatu masalah dengan baik
  - d. Terlatih dalam menjalankan suatu tanggung jawab yang sudah diberikan, dan menjadikan karakter yang bertanggung jawab dan disiplin
2. Bagi Universitas
  - a. Bahan referensi dan acuan untuk pembaca dan penulis selanjutnya.
  - b. Sebagai bahan informasi tambahan untuk mendukung peraturan dan ketentuan yang telah dibuat.
  - c. Menghasilkan lulusan yang memiliki pengalaman profesional mampu bersaing dalam kehidupan professional dimasa yang akan datang.

#### **1.5 Metode Pengolahan Data**

1. Studi Kelapangan

Penulisan laporan ini dapat dilakukan dengan mengumpulkan data dengan kegiatan magang ke instansi terkait, dan melakukan wawancara

terhadap pejabat dan karyawan instansi terkait, agar mendapatkan data yang diperlukan dan lebih akurat.

## 2. Studi kepustakaan

Yaitu dengan mencari dan mengumpulkan data dengan berbagai referensi seperti buku teks dan bahan kuliah yang berhubungan dengan masalah yang dibahas oleh penulis.

## 3. Pencarian data melalui Internet

Selain melakukan studi keperustakaan penulis juga melakukan pencarian data di internet. Dengan mengunjungi website yang berhubungan dengan yang dibahas oleh penulis, dapat memberikan masukan untuk penulis dalam menyelesaikan laporan ini.

### 1.6 Sistematika Penulisan

#### BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini memuat latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan magang, manfaat magang, metode pengolahan data, tempat dan waktu magang, dan sistematika penulisan.

#### BAB II LANDASAN TEORI

Dalam bab ini menjelaskan manajemen Sumber Daya Manusia, Analisis SWOT, Pendapatan Asli Daerah yaitu Hasil Pajak Daerah dan Hasil Retribusi Daerah dan Pariwisata.

### BAB III GAMBARAN UMUM

Dalam bab ini memuat sejarah singkat Dinas terkait, Visi dan Misi, Struktur Organisasi, Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi.

### BAB IV PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisi tentang uraian lebih lanjut mengenai pembahasan yang didapat dari magang mengenai “Strategi Dinas Pariwisata dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Padang”.

### BAB V PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan dan saran-saran yang dianggap perlu dari hasil penelitian.

